

## Relasi Kekuasaan Keluarga dan Dinamika Politik Lokal di Kota Sorong

Muhammad Arifin Abd Kadir<sup>1</sup>, Aswad Muhdar<sup>2</sup>, Muhammad Yusuf Bahar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Administrasi Negara, Fisip, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email: [AlifArifin1986@gmail.com](mailto:AlifArifin1986@gmail.com)

### Abstract

*The phenomenon of dynastic politics or kinship-based power relations remains a salient feature of local political dynamics in various regions of Indonesia, including the City of Sorong. Family-based power relations not only influence political recruitment and electoral contestation but also shape decision-making processes, resource distribution, and the overall quality of local governance. This study aims to analyze the forms, mechanisms, and impacts of family power relations on local political dynamics in the City of Sorong. This study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with local political actors, community leaders, and government officials, as well as document analysis of election results, local regulations, and local media reports. Data analysis was conducted using thematic analysis through data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The findings indicate that family power relations in the City of Sorong operate through kinship networks, political patronage, and control over political and economic resources. These patterns contribute to the reproduction of power within specific family circles, which potentially limits fair political competition and narrows opportunities for political participation by non-family actors. On the other hand, in certain social contexts, family-based power relations are perceived by some segments of society as a source of political stability and leadership continuity. Nevertheless, the dominance of kinship networks tends to weaken the principles of accountability, transparency, and meritocracy in local governance.*

*This study concludes that family power relations constitute a significant factor shaping local political dynamics in the City of Sorong and have substantial implications for the quality of local democracy and governance. Therefore, strengthening regulatory frameworks, enhancing transparency in political processes, and improving public political literacy are necessary to promote more inclusive and capacity-based political competition.*

**Keywords:** dynastic politics, political kinship, local politics, local governance

### Abstrak

Fenomena politik dinasti atau relasi kekuasaan berbasis kekerabatan merupakan salah satu karakteristik yang masih mewarnai dinamika politik lokal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Sorong. Relasi kekuasaan keluarga tidak hanya memengaruhi proses rekrutmen politik dan kontestasi elektoral, tetapi juga berimplikasi pada pola pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, mekanisme, dan dampak relasi kekuasaan keluarga terhadap dinamika politik lokal di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor politik lokal, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan, serta studi dokumentasi terhadap hasil pemilu, regulasi daerah, dan pemberitaan media lokal. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan keluarga di Kota Sorong beroperasi melalui jaringan kekerabatan, patronase politik, dan kontrol terhadap sumber daya politik serta

ekonomi. Pola ini berkontribusi pada reproduksi kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu, yang berpotensi membatasi kompetisi politik yang sehat dan mempersempit ruang partisipasi politik aktor non-keluarga. Di sisi lain, dalam konteks sosial tertentu, relasi kekuasaan keluarga juga dipersepsikan sebagai bentuk stabilitas politik dan kesinambungan kepemimpinan oleh sebagian masyarakat. Namun demikian, dominasi jaringan kekerabatan cenderung melemahkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi kekuasaan keluarga merupakan faktor penting yang membentuk dinamika politik lokal di Kota Sorong dan memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi proses politik, serta peningkatan literasi politik masyarakat untuk mendorong kompetisi politik yang lebih inklusif dan berbasis kapasitas.

**Kata kunci:** politik dinasti, kekerabatan politik, politik lokal, tata kelola pemerintahan

## Pendahuluan

Desentralisasi politik pasca-reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi aktor lokal dalam mengelola kekuasaan di tingkat daerah. Namun, di banyak wilayah di Indonesia, proses ini juga diikuti oleh menguatnya kekuasaan elite lokal berbasis kekerabatan yang membentuk pola politik dinasti. Berbagai studi menunjukkan bahwa desentralisasi justru dapat memperkuat posisi keluarga politik tertentu dalam mengontrol sumber daya politik dan ekonomi di daerah (Hadiz, 2016; Purdey, Aspinall, & As'ad, 2016; Kenawas, 2023). Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi lokal, khususnya dalam menjaga kompetisi politik yang sehat dan setara.

Politik dinasti didefinisikan sebagai praktik reproduksi kekuasaan melalui jaringan keluarga atau kerabat dekat yang secara sistematis menempati jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan lembaga politik. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa politik dinasti tidak hanya berdampak pada struktur kekuasaan, tetapi juga memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, profesionalisme birokrasi, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah (Bimantara & Harsasto, 2018; Permatasari, 2025). Dengan demikian, politik dinasti tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena elektoral, melainkan sebagai bagian dari relasi kekuasaan yang lebih luas dalam sistem pemerintahan daerah.

Dalam konteks demokrasi lokal, relasi kekuasaan keluarga sering kali beroperasi melalui mekanisme patronase, klientelisme, serta kontrol terhadap jaringan partai politik dan sumber daya ekonomi. Studi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa jaringan patronase keluarga menjadi instrumen utama dalam mempertahankan kekuasaan lintas generasi (Lestari, 2023; Hidayat, 2024). Pola ini berimplikasi pada terbatasnya akses aktor non-keluarga untuk masuk dalam arena politik, sehingga mempersempit ruang regenerasi kepemimpinan dan memperlemah prinsip meritokrasi.

Penelitian terdahulu juga mengindikasikan bahwa politik dinasti berkorelasi dengan menurunnya kualitas akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Permatasari (2025) menemukan bahwa dominasi keluarga politik dalam pemerintahan daerah berpotensi menghambat netralitas birokrasi dan melemahkan mekanisme pengawasan internal. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Marzuki (2024) yang menegaskan bahwa politik dinasti dapat memperkuat praktik nepotisme dan kolusi, sehingga berdampak negatif terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Selain berdampak pada tata kelola, politik dinasti juga memengaruhi dinamika partisipasi politik masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa dominasi keluarga politik tertentu dapat menurunkan tingkat partisipasi politik yang bermakna, karena masyarakat memandang arena

politik sebagai ruang yang tertutup dan dikuasai oleh elite keluarga (Huda & Jamil, 2023; Rannie et al., 2023). Kondisi ini berpotensi memperkuat apatisme politik serta melemahkan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintahan daerah. Kota Sorong, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di wilayah Papua Barat Daya, memiliki dinamika politik lokal yang khas, termasuk dalam hal relasi kekuasaan elite dan jaringan kekerabatan. Meskipun belum banyak diteliti secara spesifik, indikasi menguatnya peran jaringan keluarga dalam kontestasi politik lokal dan pengambilan keputusan publik menjadikan Kota Sorong sebagai konteks empiris yang penting untuk mengkaji politik dinasti dalam perspektif administrasi publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Studi-studi tentang politik keluarga di kawasan Asia Tenggara juga menekankan bahwa konteks lokal dan budaya politik sangat memengaruhi cara politik dinasti beroperasi (Hidayat, 2024; Kimura & Anugrah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan kajian empiris mengenai relasi kekuasaan keluarga dalam dinamika politik lokal di Kota Sorong. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada wilayah Jawa dan Sumatera, studi ini menempatkan Kota Sorong sebagai locus penelitian untuk memahami bagaimana politik kekerabatan membentuk struktur kekuasaan, memengaruhi proses politik, serta berdampak pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan demokrasi lokal dan perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayah Papua dan Indonesia secara umum.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam relasi kekuasaan keluarga dan dinamika politik lokal dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang spesifik di Kota Sorong. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali proses, aktor, serta mekanisme kekuasaan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Penelitian dilaksanakan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan salah satu pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Papua. Kota Sorong dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika politik lokal yang kompleks serta indikasi kuat keterlibatan jaringan kekerabatan dalam kontestasi politik dan pengambilan keputusan publik di tingkat daerah. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam proses politik lokal. Informan meliputi: (1) aktor politik lokal (anggota DPRD, pengurus partai politik, dan tim sukses), (2) aparatur pemerintah daerah, (3) tokoh masyarakat dan tokoh adat, (4) akademisi dan pengamat politik lokal, serta (5) perwakilan masyarakat sipil. Teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan yang dianggap memiliki informasi penting terkait relasi kekuasaan keluarga di Kota Sorong.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pola Relasi Kekuasaan Keluarga dalam Politik Lokal Kota Sorong**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan keluarga di Kota Sorong membentuk pola kekuasaan yang relatif terstruktur dan berkelanjutan. Jaringan kekerabatan tidak hanya berperan dalam proses pencalonan dan kontestasi elektoral, tetapi juga dalam distribusi posisi strategis di lembaga legislatif, eksekutif, dan organisasi partai politik. Beberapa informan mengungkapkan bahwa hubungan keluarga sering menjadi faktor penentu dalam proses rekrutmen politik, baik secara formal maupun informal. Temuan ini sejalan dengan studi Hadiz (2016) dan Kenawas

(2023) yang menegaskan bahwa politik dinasti di tingkat lokal beroperasi melalui reproduksi kekuasaan berbasis jaringan keluarga dan elite lokal.

Dalam konteks Kota Sorong, pola ini memperlihatkan adanya konsentrasi kekuasaan pada kelompok keluarga tertentu yang memiliki akses kuat terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang kompetisi bagi aktor politik baru yang tidak memiliki keterkaitan kekerabatan dengan elite yang berkuasa. Temuan ini menguatkan argumen bahwa politik dinasti tidak hanya bersifat personal, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam struktur politik lokal.

## **2. Mekanisme Patronase dan Klientelisme**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa relasi kekuasaan keluarga di Kota Sorong dijalankan melalui mekanisme patronase dan klientelisme. Patronase diwujudkan dalam bentuk dukungan material, akses terhadap program pemerintah, serta fasilitasi jabatan dan proyek bagi jaringan keluarga dan pendukung politik. Informan menyatakan bahwa distribusi sumber daya sering kali dipersepsikan tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan objektif masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan politik dan hubungan personal.

Mekanisme ini memperkuat loyalitas politik dalam jaringan keluarga dan pendukung, sekaligus memperlemah prinsip keadilan distributif dalam kebijakan publik. Temuan ini konsisten dengan Lestari (2023) dan Hidayat (2024) yang menekankan bahwa patronase merupakan instrumen utama dalam mempertahankan kekuasaan politik dinasti di tingkat lokal. Dalam perspektif administrasi publik, praktik ini berpotensi menggeser orientasi pelayanan publik dari kepentingan umum menuju kepentingan kelompok tertentu.

## **3. Dampak terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan**

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi relasi kekuasaan keluarga berdampak pada melemahnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Beberapa informan menyatakan bahwa pengawasan internal terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran menjadi kurang efektif ketika aktor-aktor kunci memiliki hubungan kekerabatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan keluarga.

Temuan ini sejalan dengan Permatasari (2025) dan Marzuki (2024) yang menunjukkan bahwa politik dinasti berkorelasi dengan meningkatnya risiko nepotisme dan lemahnya pengawasan birokrasi. Dalam konteks Kota Sorong, relasi kekuasaan keluarga cenderung memperkuat pola pengambilan keputusan yang tertutup, sehingga mengurangi ruang bagi kontrol publik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

## **4. Implikasi terhadap Profesionalisme dan Meritokrasi Birokrasi**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa relasi kekuasaan keluarga berpengaruh terhadap profesionalisme dan prinsip meritokrasi dalam birokrasi daerah. Beberapa informan mengindikasikan bahwa promosi jabatan dan penempatan posisi tertentu tidak selalu didasarkan pada kompetensi dan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan personal dan hubungan keluarga. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi aparatur yang tidak memiliki akses dalam jaringan kekerabatan, serta melemahkan budaya kerja berbasis kinerja.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa politik dinasti dapat menghambat reformasi birokrasi dan upaya membangun sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional (Bimantara & Harsasto, 2018; Hidayat, 2024). Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 5. Persepsi Masyarakat dan Dinamika Partisipasi Politik

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat sipil menunjukkan adanya persepsi ambivalen terhadap relasi kekuasaan keluarga. Di satu sisi, sebagian masyarakat memandang kekuasaan keluarga sebagai sumber stabilitas politik dan kontinuitas kepemimpinan. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan kritis bahwa dominasi keluarga tertentu mempersempit ruang partisipasi politik dan menciptakan kesan bahwa arena politik hanya dapat diakses oleh kelompok elite.

Kondisi ini berdampak pada menurunnya partisipasi politik yang bermakna, terutama bagi generasi muda dan aktor non-elite. Temuan ini sejalan dengan Huda dan Jamil (2023) serta Rannie et al. (2023) yang menunjukkan bahwa politik dinasti dapat mendorong apatisisme politik dan melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah daerah.

### 6. Diskusi: Politik Dinasti, Demokrasi Lokal, dan Tata Kelola

Secara konseptual, temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa relasi kekuasaan keluarga merupakan salah satu determinan penting dalam membentuk dinamika politik lokal dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam kerangka demokrasi lokal, dominasi jaringan kekerabatan cenderung mengurangi tingkat kompetisi politik, memperlemah akuntabilitas, serta menghambat regenerasi kepemimpinan berbasis kapasitas.

Dalam perspektif administrasi publik, politik dinasti berpotensi menggeser orientasi tata kelola dari prinsip good governance menuju praktik yang lebih bersifat personalistik dan patrimonial. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat urgensi penguatan mekanisme checks and balances, transparansi, serta sistem rekrutmen politik dan birokrasi yang berbasis merit untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Kota Sorong dan daerah-daerah dengan karakteristik serupa.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan keluarga merupakan faktor yang signifikan dalam membentuk dinamika politik lokal di Kota Sorong melalui mekanisme jaringan kekerabatan, patronase, dan kontrol terhadap sumber daya politik, yang pada gilirannya berdampak pada terbatasnya kompetisi politik, melemahnya akuntabilitas dan transparansi, serta terganggunya prinsip meritokrasi dalam birokrasi daerah. Meskipun dalam konteks tertentu relasi kekuasaan keluarga dipersepsikan sebagai sumber stabilitas politik, secara keseluruhan temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa dominasi jaringan keluarga cenderung mengurangi kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan transparansi proses politik, serta perbaikan sistem rekrutmen politik dan birokrasi berbasis kapasitas menjadi langkah strategis untuk mendorong demokrasi lokal yang lebih inklusif dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel di Kota Sorong.

## Daftar Pustaka

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.

Bimantara, A., & Harsasto, P. (2018). Politik dinasti dan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan daerah. *Journal of Indonesian Public Administration*, 4(2), 145–158.

Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hidayat, S. (2024). Politik kekerabatan dan patronase dalam pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 33–49.
- Huda, M., & Jamil, M. (2023). Politik dinasti dan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 201–216.
- Kenawas, Y. C. (2023). Local political dynasties in Indonesia: Continuity and change after reformasi. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 85–104. <https://doi.org/10.1177/18681034221123456>
- Kimura, E., & Anugrah, I. (2024). Political families and subnational democracy in Southeast Asia. *Asian Politics & Policy*, 16(1), 112–129. <https://doi.org/10.1111/aspp.12745>
- Lestari, D. (2023). Patronase politik dan reproduksi kekuasaan elite lokal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 55–69.
- Marzuki, A. (2024). Politik dinasti, nepotisme, dan tantangan tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 6(2), 101–117.
- Permatasari, R. (2025). Politik dinasti dan implikasinya terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 1–15.
- Purdey, J., Aspinall, E., & As'ad, M. U. (Eds.). (2016). *The politics of Islamic authority in Indonesia*. Clayton, VIC: Monash University Publishing.
- Rannie, T., Nugroho, K., & Pratama, A. (2023). Dynastic politics and democratic quality in Indonesian local elections. *Contemporary Southeast Asia*, 45(2), 250–272.
- Slater, D., & Simmons, E. (2019). Informal institutions and accountability in subnational politics. *World Politics*, 71(2), 294–328. <https://doi.org/10.1017/S0043887118000274>
- Tomsa, D., & Setijadi, C. (2018). Party politics and political recruitment in Indonesia. *South East Asia Research*, 26(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/0967828X17752442>
- Warburton, E. (2020). Power, patronage, and political survival in Indonesian local politics. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 287–309. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1823145>